

BAB II

MANAJEMEN LABA DAN JENIS KAP

2.1. Manajemen Laba

Manajemen laba adalah upaya manajer perusahaan untuk mempengaruhi informasi-informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui *stakeholder* yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan (Sulistiyanto 2008 :6). Laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen perusahaan kepada *stakeholder* dapat menurun kualitasnya karena adanya praktik manajemen laba.

Sebagai pengelola perusahaan, manajer adalah satu-satunya pihak yang menguasai informasi. Sedangkan pihak lain yang di luar perusahaan yaitu investor (pemilik), kreditur, *supplier*, regulator, pemerintah, dan *stakeholder* lain hanya mengandalkan informasi yang disajikan manajemen. Selain kuantitas informasi, kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh motivasi dan sikap etis seorang manajer. Semakin meragukan motivasi dan sikap etis seorang manajer, semakin meragukan kualitas informasi yang disajikan. Dengan demikian manajer adalah pihak yang superior dalam menguasai informasi. Kesenjangan informasi antara manajer dengan *stakeholder* ini disebut asimetri informasi.

Asimetri informasi yang terjadi ini mendorong manajer untuk berperilaku oportunistik. Manajer hanya akan mengungkapkan informasi jika pengungkapan itu membawa keuntungan bagi dirinya, misalkan untuk memperoleh bonus.

Sulistiyanto (2008) menulis, ada tiga pola manajemen laba yang dapat dilakukan oleh manajer. *Pertama, income increasing* yang dilakukan dengan menaikkan laba perusahaan lebih besar dari laba sesungguhnya jika manajer menginginkan kinerja perusahaan terlihat bagus. *Kedua, income decreasing*, dilakukan Jika manajer menginginkan kinerja perusahaan lebih rendah dari kinerja sesungguhnya, manajer dapat menurunkan laba perusahaannya. Sedangkan pola yang ketiga, *income smoothing*, dilakukan dengan mengatur sedemikian rupa laporan keuangannya jika manajer ingin labanya tidak bergerak secara fluktuatif, sehingga laba terlihat merata selama periode-periode tersebut.

Sesuai dengan PSAK no.1, tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan *stakeholder* untuk pengambilan keputusan. Tidak berkualitasnya informasi dalam laporan keuangan akan mengakibatkan keputusan yang diambil oleh *stakeholder* menjadi tidak berkualitas juga.

2.1.1. Teori keagenan

Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak atau satu orang atau lebih (prinsipal) untuk meminta orang lain (agen) melakukan pekerjaan sesuai dengan kepentingan prinsipal (Jensen dan Meckling, 1976 dalam Sanjaya, 2008). Jika kedua belah pihak berhubungan untuk memaksimalkan utilitas, maka ada kemungkinan agen tidak selalu bertindak untuk kepentingan utama prinsipal. Untuk itu prinsipal mengeluarkan biaya untuk membatasi agen dengan cara penetapan insentif. Selain itu, prinsipal juga mengeluarkan biaya pemantauan untuk memonitor aktivitas agen.

2.1.2. Prinsip Akuntansi Berbasis Akrua

Prinsip akuntansi yang berterima umum menggunakan basis akrual. Basis akrual merupakan dasar pencatatan akuntansi yang mewajibkan perusahaan untuk mengakui hak dan kewajiban tanpa memperhatikan kas akan diterima atau dikeluarkan. Basis akrual ini timbul karena akuntansi menggunakan periode waktu sebagai takaran pengukuran laba (Suwardjono 2003:162).

Berbeda dengan prinsip akuntansi berbasis akrual, prinsip akuntansi berbasis kas hanya mengakui hak dan kewajiban apabila kas benar-benar diterima. Dengan demikian, laba yang diakui dalam suatu periode baru akan diakui bila kas telah diterima (Sulistyanto 2008:161).

Model akuntansi berbasis kas tidak dapat mencerminkan kinerja perusahaan selama periode tertentu. Sehingga, model ini relatif jarang digunakan dan tidak sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Sedangkan model akuntansi berbasis akrual dipandang lebih baik dalam mencerminkan kinerja perusahaan dalam satu periode. Namun, ada kelemahan yang melekat pada akuntansi berbasis akrual ini, yaitu sifat *account* akrual yang rawan direkayasa, tanpa harus melanggar prinsip akuntansi berterima umum (Sulistyanto 2008:162).

2.1.3. Model untuk Mendeteksi Manajemen Laba

Secara umum, ada tiga pendekatan yang telah dihasilkan peneliti untuk mendeteksi manajemen laba, yaitu model yang berbasis *aggregate accruals*, *specific accruals*, dan *distribution of earning* (Sulistyanto 2008: 211).

1. Model berbasis *aggregate accruals*

Model berbasis *aggregate accruals* merupakan model yang menggunakan *discretionary accruals* sebagai proksi manajemen laba (Sulistyanto, 2008: 211). Model ini pertama kali dikembangkan oleh Healy, DeAngelo, dan Jones. Selanjutnya model Jones dimodifikasi dikembangkan oleh Dechow, Sloan, dan Sweeney.

2. Model berbasis *specific accruals*

Model berbasis *specific accruals* adalah model yang menghitung akrual sebagai proksi manajemen laba dengan menggunakan komponen laporan keuangan tertentu dari industri tertentu misalnya piutang tak tertagih dari sektor industri tertentu. Model ini dikembangkan oleh MC. Nicholas dan Wilson, Petroni, Beaver dan Engel, Beaver dan Mc.Nicholas (Sulistyanto 2008: 211).

3. Model berbasis *distribution of earning*

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan pengujian secara statistik terhadap komponen-komponen laba untuk mendeteksi faktor yang mempengaruhi pergerakan laba. Model berbasis *distribution of earning* terfokus pada laba di sekitar *benchmark* yang dipakai, misalnya laba kuartal sebelumnya, untuk menguji apakah *incidence* yang berada di atas maupun di bawah *benchmark* telah merefleksikan ketidakberlanjutan kewajiban untuk menjalankan kebijakan yang telah dibuat. Model ini dikembangkan oleh Burghtaler dan Dichev, Degeorge, Patel, dan Zeckhauzer, serta Myers dan Skinner (Sulistyanto 2008: 211).

Komponen akrual terdiri dari dua, yaitu *non discretionary accruals* dan *discretionary accruals* (Sulistyanto,2008:164 dan Meutia, 2004:335). *Non discretionary accruals* adalah komponen akrual yang dibentuk secara alamiah dari dasar pencatatan akrual dengan mengikuti standar akuntansi yang diterima secara umum. Misalnya metode depresiasi dan penentuan persediaan yang dipilih harus mengikuti prosedur akuntansi (Sulistyanto,2008:164). Selain itu, Meutia (2008) juga menyatakan bahwa komponen *non-discretionary* adalah komponen yang tidak dapat dipengaruhi oleh manajer seperti permintaan terhadap penjualan. Sedangkan *discretionary accruals* adalah komponen akrual hasil kebijakan manajerial dengan memanfaatkan kebebasan dan keleluasaan dalam estimasi dan pemakaian standar akuntansi (Sulistyanto,2008:164). Manajer memiliki kebebasan untuk memilih standar akuntansi yang akan digunakan. Dengan kata lain, komponen *discretionary accruals* adalah komponen yang dapat dimanipulasi oleh manajer.

2.1.4. Motivasi Manajemen Laba

Manajemen laba memanipulasi besaran laba yang dilaporkan kepada para pemegang saham dan mempengaruhi hasil perjanjian yang tergantung pada angka-angka akuntansi yang dilaporkan (Healy dan Wahlen, 1999). Manajemen laba dilakukan berdasarkan motivasi sebagai berikut:

a. Motivasi Bonus

Adanya asimetri informasi mengenai keuangan perusahaan menyebabkan pihak manajemen dapat mengatur laba bersih untuk memaksimalkan bonus mereka (Sulistyanto, 2008: 63).

b. Motivasi Kontraktual Lainnya

Semakin dekat suatu perusahaan ke pelanggan hutang, manajemen akan cenderung memilih prosedur akuntansi yang dapat 'memindahkan' laba periode mendatang ke periode berjalan, yang bertujuan untuk mengurangi kemungkinan perusahaan mengalami *technical default* (kegagalan dalam pelunasan hutang).

c. Motivasi Politik

Perusahaan besar dan industri yang strategik akan menjadi perusahaan monopoli. Dalam hal demikian, perusahaan ini akan menggunakan manajemen laba untuk meningkatkan visibilitasnya dengan cara menggunakan prosedur akuntansi untuk menurunkan laba yang diperoleh (Sanjaya, 2008).

d. Motivasi Pajak

Manajer termotivasi untuk melakukan manajemen laba karena pajak penghasilan. Praktik manajemen laba dilakukan untuk menurunkan pajak penghasilan (Sanjaya, 2008).

e. Perpindahan CEO

Hipotesis rencana bonus menyatakan bahwa manajemen yang akan diganti akan melakukan manajemen laba untuk memaksimalkan bonus yang akan diperolehnya (Sanjaya, 2008).

f. Motivasi Pasar Modal

Motivasi pasar modal muncul karena informasi akuntansi digunakan secara luas oleh para investor dan analis untuk menilai saham. Dalam hal demikian, kondisi ini dapat kesempatan bagi manajer untuk memanipulasi

earnings dengan cara mempengaruhi harga saham jangka pendek (Sanjaya, 2008).

2.2. Tinjauan tentang Perbankan

Bank adalah sebuah lembaga atau perusahaan yang aktivitasnya menghimpun dana berupa giro, deposito, tabungan, dan simpanan lain dari pihak yang kelebihan dana (*surplus psending unit*) kemudian menempatkannya kembali kepada pihak yang kekurangan dana (*deficit spending unit*) melalui penjualan jasa keuangan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak (Taswan, 2010: 6). Beberapa karakteristik bank adalah sebagai berikut (Taswan, 2010: 7):

1. Bank adalah lembaga yang berperan sebagai lembaga perantara keuangan antara pihak-pihak yang kelebihan dana (*surplus psending unit*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dana (*deficit spending unit*), serta berfungsi untuk memperlancar lalu lintas pembayaran giral. Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan atas dasar kepercayaan.
2. Bank merupakan industri yang kegiatannya mengandalkan kepercayaan sehingga harus selalu menjaga kesehatannya. Pemeliharaan kesehatan bank antara lain melalui pemeliharaan kecukupan modal, kualitas aktiva, manajemen, pencapaian profit, dan likuiditas yang cukup.
3. Pengelola bank dalam melakukan kegiatannya juga dituntut senantiasa menjaga keseimbangan pemeliharaan likuiditas dengan kebutuhan profitabilitas yang wajar serta modal yang cukup sesuai dengan penanamannya.
4. Bank juga dapat dipandang sebagai lembaga kepercayaan masyarakat dan bagian dari sistem moneter yang memiliki kedudukan strategis sebagai penunjang pembangunan.
5. Secara operasional ciri khas bank yaitu: aktiva tetapnya rendah, lebih banyak jumlah hutang jangka pendeknya dan perbandingan antara aktiva dengan modal (*financial leverage*) sangat besar.

2.2.1. Laporan Keuangan Perbankan

Laporan keuangan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dengan kinerja bank yang dicapai selama periode tertentu (Tawan, 2008: 39). Bank komersial baik bank umum maupun bank perkreditan rakyat wajib menerbitkan laporan keuangan selama periode tertentu, yaitu bulanan, triwulanan, dan tahunan.

Format laporan keuangan secara umum seperti tampak dalam format neraca, bahwa pos-pos yang dianggap sensitif seperti penempatan pada bank Indonesia disajikan secara terperinci. Aktiva yang paling sensitif yaitu kredit yang diberikan disajikan secara terpisah menurut terkait dan tidak terkait dengan bank. Hal ini menunjukkan bank harus lebih transparan, dalam arti untuk mendeteksi secara dini adanya bank yang memberikan kredit untuk anak perusahaannya sendiri atau untuk perusahaan lain yang masih dalam satu kelompok dengan bank lain atau untuk pihak lain yang terafiliasi (Taswan, 2008: 39).

Penyisihan penghapusan aktiva produktif disajikan secara terpisah menurut aktiva produktif. Pemisahan ini bertujuan untuk mencerminkan kualitas aktiva produktif dari jenis aktiva produktif, karena besarnya penyisihan aktiva produktif akan mencerminkan kualitas aktiva produktif itu sendiri.

Tuntutan transparansi laporan keuangan mulai tahun 2001, di mana laporan keuangan harus dilengkapi dengan kualitas aktiva produktif dan informasi lainnya (Taswan, 2008: 41). Hal ini sesuai dengan Peraturan Perbankan nomor 3/22/PBI/2001 tentang transparansi kondisi keuangan bank, yang menyatakan

bahwa mulai tanggal peraturan ini ditetapkan, yaitu tanggal 13 Desember 2001, laporan keuangan bank harus dilengkapi dengan laporan kualitas aktiva produktif dan informasi lainnya sesuai dengan standar yang berlaku.

2.2.2. Akuntansi Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)

Aset produktif menurut PSAK no.31 Revisi 2000 paragraf 11 adalah:

Penanaman dana bank, baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk kredit, efek (surat berharga), efek yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repo*), tagihan derivatif, penempatan dana pada bank-bank lain, penyertaan, dan lain-lain.

Penyisihan menghapuskan produktif berdasarkan surat keputusan direksi Bank Indonesia No.31/148/KEP/DIR tentang PPAP adalah:

Cadangan yang harus dibentuk berdasarkan presentase tertentu dari nominal berdasarkan penggolongan aktiva produktif sebagaimana yang ditentukan dalam surat keputusan direksi Bank Indonesia No.31/148/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang kualitas aktiva produktif.

Dalam pembentukan PPAP, bank akan memperhitungkan setiap jenis aktiva yang masih *outstanding* dari yang berkualitas lancar hingga macet. Kriteria lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet didasarkan pada (Taswan, 2008:263):

1. Ketepatan pembayaran kembali pokok dan bunga serta kemampuan peminjam yang ditinjau dari keadaan usaha yang bersangkutan untuk kredit yang diberikan.
2. Tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan untuk surat-surat berharga.

Beberapa jenis aktiva produktif yang turut diperhitungkan dalam PPAP berdasarkan surat keputusan direksi Bank Indonesia No.31/148/KEP/DIR tentang PPAP adalah:

1. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga: termasuk: pemelian surat berharga nasabah yang dilengkapi dengan *net purchasing agreement* (NPA), pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang.
2. Surat berharga yang dimaksud adalah surat pengakuan hutang, wesel, obligasi, sekuritas kredit, atau derivatifnya, atau suatu kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang, antara lain Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Berharga Pasar Uang (SPBU), Surat Berharga Komersial (*commercial papers*), Sertifikat reksadana, dan *Medium Term Note*.
3. Penempatan dana yang dimaksud dalam hal ini adalah penanaman dana bank pada bank lainnya dalam bentuk giro, *call money*, deposito berjangka, sertifikat deposito, kredit yang diberikan, dan penempatan lainnya.
4. Penyertaan adalah penanaman dana dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan yang tidak melalui pasar modal, serta dalam bentuk penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur untuk mengatasi akibat kegagalan kredit.
5. Transaksi rekening administratif adalah komitmen dan kontijensi (*off balance sheet*) yang terdiri dari warkat penerbitan jaminan, akseptasi/endosemen, *irrecovable Letter of Credit* (L/C) yang masih berjalan, akseptasi wesel impor atas dasar L/C berjangka, penjualan surat berharga dengan syarat *repurchase agreement* (Repo), *stanby LC*, dan garansi lainnya serta transaksi derivative yang mempunyai resiko kredit.

Cadangan yang dibentuk dari aktiva produktif berdasarkan surat keputusan Direksi Bank Indonesia No.31/148/KEP/DIR adalah:

1. Cadangan umum PPAP ditetapkan sekurang-kurangnya 1% dari aktiva produktif yang digomlongkan lancar, tidak termasuk SBI dan surat utang pemerintah.
2. Cadangan khusus PPAP yang ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar:
 - a. 5% dari aktiva produktif yang digolongkan dalam perhatian khusus, dan

- b. 15% dari aktiva produktif yang digolongkan kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan.
- c. 50% dari aktiva produktif yang digolongkan diragukan setelah dikurangi nilai agunan, dan
- d. 100% dari aktiva produktif yang digolongkan macet setelah dikurangi nilai agunan.

Agunan yang dipergunakan sebagai pengurang untuk pembentukan PPAP

(surat keputusan direksi Bank Indonesia No.31/148/KEP/DIR) adalah:

1. Giro, deposito, tabungan, dan setoran jaminan dalam mata uang rupiah dan valuta asing yang diblokir disertai dengan surat kuasa pencairan.
2. Sertifikat bank Indonesia dan surat utang pemerintah.
3. Surat berharga yang aktif diperdagangkan di pasar modal.
4. Tanah, gedung, rumah, tinggal, pesawat udara, dan kapal laut.

Penilaian-penilaian agunan tersebut dinilai oleh jasa penilai independen (jasa penilai). Dalam penilaian dikenal beberapa terminologi yaitu (surat keputusan direksi Bank Indonesia No.31/148/KEP/DIR):

1. Nilai pasar adalah jumlah uang yang diperkirakan dapat diperoleh dalam transaksi jual beli atau transaksi penukaran suatu aset, pada tanggal penilaian setelah dikurangi biaya-biaya transaksi, pihak penjual dan pembeli sebelumnya tidak mempunyai ikatan, memiliki pengetahuan tentang aset yang diperdagangkan, dan melakukan transaksi tidak dalam keadaan terpaksa.
2. Kalkulasi biaya adalah perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi aktiva baru setelah dikurangi penyusutan akibat kerusakan fisik dan penurunan nilai ekonomis.
3. Kapitalisasi pendapatan (*income approach*) adalah nilai tunai penerimaan kas masa depan (*present value*) dari pendapatan yang diperkirakan akan diterima dalam jangka waktu 5-10 tahun.

Peraturan mengenai penyisihan penghapusan aktiva produktif ini telah diatur dalam surat keputusan direksi Bank Indonesia No.31/148/KEP/DIR.

Penghapusbukaan kredit yang telah digolongkan dalam keadaan macet pada waktu tertentu dapat dilakukan. Pengertian penghapusbukaan adalah dikeluarkan dari neraca. Namun, pokok kredit (baki debit) dan bunga yang macet

harus dihapusbukukan untuk selanjutnya dibebankan kepada rekening penyisihan penghapusbukuan kredit (Taswan, 2008:267).

Dalam menghimpun dana melalui masyarakat dalam bentuk kredit, perusahaan perbankan harus mengakui adanya pendapatan bunga. PSAK no.31 (revisi tahun 2000) menuliskan bahwa:

Pengakuan pendapatan dan bunga merupakan hal yang sangat fundamental dan menjadi dasar utama untuk menentukan profitabilitas bank. Kegiatan utama bank adalah menghimpun dana yang umumnya berbunga (*interest bearing*) dan menanamkannya dalam aset produktif. Seperti pada industri lain, dalam perbankan juga terdapat perbedaan waktu antara diterimanya pendapatan dan terjadinya beban yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan tersebut. Sehingga *matching* antara pendapatan dan beban perlu memperhatikan karakteristik usaha bank.

Pengakuan pendapatan bunga diakui secara akrual. Kecuali pendapatan bunga dari kredit dan aset produktif lain yang *non performing*, pendapatan bunganya diakui secara kas (pada saat pendapatan tersebut diterima).

2.3. Manajemen Laba pada Perusahaan Perbankan

Lembaga perbankan adalah lembaga yang paling banyak diatur oleh pemerintah. Regulasi perbankan ini dibuat untuk memelihara sistem keuangan yang sehat dan aman untuk menjamin keunikan-keunikan pelayanan atau jasa bank untuk meningkatkan mekanisme efisiensi yang lebih besar dalam mengalokasikan dana (Taswan, 2010: 33). Salah satu regulasi yang berlaku di lingkungan perbankan adalah beberapa persyaratan umum bagi bank non devisa untuk menjadi bank umum devisa antara lain : CAR minimum dalam 6 bulan terakhir 8%; tingkat kesehatan selama 24 bulan terakhir berturut-turut tergolong

sehat, modal disetor minimal Rp.150 miliar (Taswan, 2010: 52). Selain itu, perusahaan perbankan juga harus memenuhi syarat kecukupan modal agar dapat dinyatakan sebagai perusahaan yang sehat. Persyaratan semacam ini mendorong perusahaan untuk melakukan manajemen laba. Untuk dapat diakui sebagai perusahaan yang sehat, perusahaan akan merekayasa kinerja sesuai dengan batas minimal persyaratan dalam regulasi itu (Sulistyanto, 2008).

Beberapa hasil riset menunjukkan bahwa bank bank yang mendekati CAR minimum cenderung untuk melakukan manajemen laba dengan *overstate loan loss provisions*, *understate loan write-offs* dan mengakui *abnormal realized gains* atas portofolio sekuritas (Moyer 1990; Beaty dkk. 1995; Ahmed dkk. 1999; dan Collins dkk. 1995 dalam Rahmawati, 2007). Nasution dan Setiawan (2007) juga mengadakan penelitian mengenai praktik manajemen laba industri perbankan di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbankan di Indonesia melakukan praktik manajemen laba dengan pola peningkatan laba.

Berdasarkan penelitian Rahmawati (2007), model Beaver and Engel (1996) merupakan model yang paling sesuai untuk mendeteksi manajemen laba pada industri perbankan. Model ini memproksikan manajemen laba dengan menggunakan akrual khusus, dengan menggunakan komponen penyisihan kerugian piutang (*allowances for loan losses*) dan provisi kerugian piutang sebagai komponen pembentuk total akrual dalam perusahaan perbankan.

Penelitian Rahmawati (2007) dan penelitian Nasution dan Setiawan (2007) menggunakan total saldo Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) sebagai total akrual. Berdasarkan surat keputusan direktur Bank Indonesia

No.31/148/KEP/DIR tentang PPAP, yang dimaksud dengan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar presentase tertentu dari nominal berdasarkan penggolongan aktiva produktif.

Model Beaver and Engel (1998) dirumuskan sebagai berikut:

$$NDA_{it} = \beta_0 + \beta_1 CO_{it} + \beta_2 LOAN_{it} + \beta_3 NPA_{it} + \beta_4 \Delta NPA_{it+1} + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

$$TA_{it} = NDA_{it} + DA_{it} \quad (2)$$

$$TA_{it} = \beta_0 + \beta_1 CO_{it} + \beta_2 LOAN_{it} + \beta_3 NPA_{it} + \beta_4 \Delta NPA_{it+1} + Z_{it} \quad (3)$$

Di mana :

CO_{it} : *loan charge offs* (pinjaman yang dihapus bukukan)

$LOAN_{it}$: *loan outstanding* (pinjaman yang beredar)

NPA_i : *non performing asets* (aktiva produktif yang bermasalah)

TA_{it} : akrual total (Total Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif)

Loan charge offs (pinjaman yang dihapus bukukan) memainkan peranan bahwa penghapusbukuan piutang tahun berjalan akan mempengaruhi ekspektasi kolektibilitas kredit. Identifikasi akuntansi untuk perubahan Penyisihan Penghapusan, *ceteris paribus*, efek dari piutang dihapusbukukan bersih adalah untuk menurunkan PPAP. Perubahan kredit bermasalah dalam satu tahun ke depan merupakan informasi bahwa manajer akan menghadapi kerugian kredit (Beaver and Engel, 1998: 187). Griffin (1998) dalam Kristianti (2006) memusatkan perhatiannya tentang bagaimana dan kapan suatu bank mengakui dan melaporkan penentuan untuk kerugian pinjaman. Pinjaman bermasalah mempunyai akibat buruk terhadap likuiditas bank dan meningkatkan

kemungkinan rugi. Kerugian tentunya tidak diinginkan, karena kerugian dapat mengurangi cadangan atau modal, yang menguras kekuatan keuangan bank.

2.4. Kebutuhan akan Audit Laporan Keuangan

Empat kondisi yang mendorong perlunya dilakukan audit akan laporan keuangan antara lain (Boynton, 2001: 46):

1. Pertentangan kepentingan

Pengguna laporan keuangan memberikan perhatian pada pertentangan kepentingan antara para pengguna dan para pemakai laporan keuangan. Kekhawatiran tersebut berkembang menjadi kekhawatiran bahwa manajemen akan menyusun laporan keuangan untuk kepentingan manajemen sendiri. Oleh karena itu, para pengguna laporan keuangan mencari keyakinan dari auditor independen luar bahwa informasi tersebut telah: 1) bebas dari bias untuk kepentingan manajemen dan 2) netral untuk kepentingan berbagai kelompok pengguna.

2. Konsekuensi

Laporan keuangan menyajikan informasi yang penting dan dalam beberapa kasus merupakan satu-satunya sumber informasi yang digunakan untuk membuat keputusan investasi yang signifikan, peminjaman, dan keputusan investasi lainnya. Untuk itu para pengguna laporan keuangan berharap laporan keuangan menyajikan data yang relevan. Hal ini dikarenakan keputusan yang akan diambil adalah keputusan yang akan membawa konsekuensi ekonomi, sosial, dan konsekuensi lain yang signifikan. Sehingga para pengguna laporan

keuangan melirik auditor independen untuk mendapatkan keyakinan bahwa laporan keuangan perusahaan telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi berterima umum.

3. Kompleksitas

Masalah akuntansi dan proses penyusunan laporan keuangan telah menjadi kompleks. Hal ini meningkatkan risiko salah interpretasi dan risiko timbulnya kesalahan yang tidak disengaja, karena tidak mungkin para pengguna laporan keuangan mengevaluasi sendiri mutu laporan keuangan.

4. Keterpencilan

Catatan akuntansi utama yang dapat digunakan untuk mengadakan verifikasi atas asersi laporan keuangan sulit untuk diakses para pengguna laporan keuangan. Hal ini dikarenakan faktor jarak, waktu, dan biaya. Sehingga, para pengguna laporan keuangan mengandalkan laporan auditor untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Keempat kondisi ini bersama-sama membentuk risiko informasi (*information risk*), yaitu risiko bahwa laporan keuangan mungkin disajikan secara tidak benar, tidak lengkap, atau bias. Sehingga dapat dikatakan bahwa audit laporan keuangan dapat meningkatkan kredibilitas laporan keuangan dengan cara menekan risiko informasi (Boynton, 2001: 47).

2.5. Kantor Akuntan Publik

Untuk mengatasi Kekhawatiran bahwa laporan keuangan akan disusun sedemikian rupa oleh manajemen sehingga menjadi bias untuk kepentingan

manajer, para *stakeholder* membutuhkan auditor independen dari luar yang bebas dari kepentingan manajemen dan netral untuk kepentingan berbagai kelompok pengguna (Boynton, 2001: 46).

Para pengguna laporan keuangan dapat menggunkan KAP yang berafiliasi dengan *big four* atau KAP yang tidak berafiliasi dengan *non big four*. Auditor *big four* adalah auditor yang memiliki keahlian dan reputasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan auditor *non big four*. Untuk mempertahankan reputasi ini, KAP *big four* pasti akan berusaha menampilkan kinerja yang baik sehingga kepercayaan dan pangsa pasar yang telah dimilikinya tidak hilang seperti yang terjadi pada kasus Enron (Sanjaya, 2008). Disamping itu, KAP yang tergabung dalam KAP *big* memasang tarif yang lebih tinggi, menghabiskan lebih banyak waktu pada pekerjaan audit (DeAngelo 1981).

KAP di Indonesia yang berafiliasi dengan *big four* adalah sebagai berikut:

- a. Sidharta & Sidharta yang berafiliasi dengan KPMG.
- b. Prasetyo, Sarwoko, dan Sandjaja yang berafiliasi dengan Ernest and Young.
- c. Hans Tuanakota dan Mustofa yang berafiliasi dengan Deloitte Touche & Tohmatsu.
- d. Hadi Susanto yang berafiliasi dengan Pricewaterhouse Coopers.

2.6. Perbedaan Manajemen laba menurut Jenis Kap *big N* dan *non big N*

Kualitas audit bukanlah merupakan suatu yang dapat langsung diamati. Persepsi terhadap kualitas audit berkaitan dengan nama auditor. Dalam hal ini nama baik perusahaan merupakan gambaran yang paling penting. Baik secara

teori ataupun empirik, kualitas auditor seringkali diukur dengan menggunakan ukuran kantor akuntan publik.

De Angelo (1981) mendefinisikan kualitas audit sebagai probabilitas dimana seorang auditor:

1. Menemukan adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya, dan
2. Melaporkan pelanggaran tersebut.

Probabilitas bahwa auditor akan menemukan pelanggaran tergantung pada kemampuan teknologi auditor, prosedur audit dipekerjakan pada audit yang diberikan, tingkat sampling, dll. Probabilitas bersyarat dari pelaporan pelanggaran ditemukan adalah ukuran auditor independen dari seorang klien yang diberikan (De Angelo, 1981).

Konsumen suatu proses audit adalah pihak-pihak yang berkepentingan dari suatu perusahaan, seperti karyawan, pemegang saham, kreditor, pemerintah, masyarakat luas. Jika konsumen akan meneliti kualitas auditor, konsumen harus mengeluarkan biaya untuk mengevaluasi kualitas audit, evaluasi yang dilaksanakan adalah evaluasi mengenai probabilitas bahwa auditor tertentu akan menemukan dan melaporkan pelanggaran yang pada Klien diberikan sebuah audit. Pertama, prosedur aktual yang dilaksanakan pada saat perikata audit pada umumnya tidak secara langsung diamati oleh konsumen. Kedua, konsumen memiliki informasi sedikit tentang insentif yang terdapat dalam kontrak auditor - klien yang mempengaruhi probabilitas melaporkan menemukan pelanggaran. Untuk alasan ini, evaluasi biaya kualitas audit cenderung sangat signifikan (De Angelo, 1981).

De Angelo (1981) juga menulis bahwa ketika kualitas audit mahal untuk dievaluasi, ketertarikan diri individu merancang alternatif yang memungkinkan kualitas audit dapat ditukarkan dengan suatu hal. Hal ini dapat mengurangi biaya untuk mengevaluasi kualitas audit. Satu respon potensial bagi konsumen untuk mengembangkan pengganti untuk kualitas audit, yaitu, mengandalkan pada beberapa hal lain (lebih murah untuk mengamati) variabel yang (Sempurna) berhubungan dengan kualitas. Penelitian saat ini berargumen bahwa ukuran auditor berfungsi sebagai pengganti untuk kualitas audit.

DeAngelo (1981) berargumentasi bahwa kualitas audit secara langsung berhubungan dengan ukuran dari perusahaan audit, dengan proksi untuk ukuran perusahaan audit adalah jumlah klien. Perusahaan audit ukuran besar adalah perusahaan dengan jumlah klien terbesar (Boynton, 2001:24).

Hasil penelitian DeAngelo (1981) menunjukkan bahwa KAP yang besar (*the big*) akan berusaha untuk menyajikan kualitas audit yang lebih besar dibandingkan dengan KAP yang kecil. Kemampuan teknis, *audit fee* yang tinggi dan waktu penyelesaian yang lebih lama membuat KAP yang berafiliasi dengan *big six* memiliki lebih sedikit permasalahan dibandingkan dengan KAP *non big six* (DeAngelo, 1981).

Hasil penelitian De Angelo (1981) juga membuktikan bahwa perusahaan audit yang besar akan berusaha untuk menyajikan kualitas audit yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan audit yang kecil. Hal ini dikarenakan jika perusahaan audit yang besar tidak memberikan kualitas audit yang tinggi, akan berakibat pada hilangnya reputasi yang telah mereka miliki, dan jika ini terjadi

maka perusahaan audit besar akan mengalami kerugian yang lebih besar dengan kehilangan klien. Semakin besar ukuran KAP, semakin kecil dorongan auditor untuk berperilaku oportunistik, maka semakin tinggi kualitas audit.

Ukuran untuk kualitas auditor juga dapat diterapkan pada auditor tingkat individu. Ketika partner berbagi secara proporsional dalam keuntungan perusahaan audit, semakin besar jumlah klien, semakin sedikit kekayaan partner yang diperoleh dari seorang klien, tergantung pada mempertahankan klien tersebut. Oleh karena itu, semakin besar probabilitas bahwa auditor akan melaporkan pelanggaran temuannya. Akibatnya, dampak dari keputusan audit pada kekayaan pribadi auditor berkurang (DeAngelo, 1981).

Penempatan auditor *big five* oleh suatu perusahaan terkait dengan reputasi dan kredibilitas internasional yang dimiliki auditor. Penunjukan auditor *big five* merupakan sinyal bagi publik bahwa laporan keuangan yang disajikan memiliki reliabilitas yang tinggi. Ini dilakukan supaya harga pasar saham tidak didiskon oleh investor dan calon investor (Fan dan Wong, 2005 dalam Sanjaya, 2008).

Becker et al (1998) melakukan penelitian pada perusahaan yang terdaftar pada COMPUSTAT. Becker membuktikan bahwa manajemen melakukan praktik manajemen laba dengan pola peningkatan laba pada perusahaan yang diaudit oleh KAP *non big six* dibandingkan dengan KAP *big six*. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan laba *discretionary accruals* yang lebih besar bagi perusahaan yang diaudit oleh KAP *big six* dibandingkan dengan KAP *non big six*. Sehingga, KAP *big six* lebih mampu mencegah manajemen laba dari pada KAP *non big six*. Penelitian ini sejalan dengan penelitian De Angelo (1981) yang menunjukkan

bahwa auditor *big six* lebih berkualitas dibandingkan dengan auditor *non big six*. Hal ini dikarenakan auditor *big six* memasang tarif yang lebih tinggi, menghabiskan lebih banyak waktu pada pekerjaan audit, dan mengalami permasalahan yang lebih sedikit dibandingkan dengan KAP *non big six*.

Meutia (2004) melakukan penelitian terhadap hubungan negatif antara kualitas audit dengan manajemen laba. Kualitas audit ditentukan dengan KAP *big five* dan *non big five*. Sedangkan manajemen laba diukur dengan *absolute discretionary accruals* dengan menggunakan model Jones (1991). Penelitian dilakukan pada semua perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEJ pada tahun 1998-2001. Jumlah perusahaan sampel ada 131 perusahaan. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa terdapat hubungan negatif antara kualitas audit dengan manajemen laba. Selain itu, penelitian Meutia (2004) juga membuktikan bahwa mean *absolute discretionary accruals* perusahaan yang diaudit oleh *big five* lebih besar dari mean *absolute discretionary accruals* perusahaan yang diaudit oleh *non big five* dengan signifikansi 0,069 (signifikan pada tahap 10%). Penelitian ini mendukung penelitian DeAngelo (1981) yang menyatakan bahwa kantor akuntan publik yang lebih besar memiliki dorongan yang lebih besar untuk mendeteksi dan mengungkapkan kesalahan yang dilakukan oleh manajer.

Sanjaya (2008) yang meneliti perbedaan manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dari tahun 2001 sampai tahun 2004 menunjukkan bahwa ada perbedaan manajemen laba antara perusahaan yang diaudit oleh KAP *big four* dan *non big four*. Model yang digunakan untuk mendeteksi manajemen laba adalah model Jones (1991). Perusahaan yang diaudit

oleh KAP *non big four* memiliki *absolute discretionary accruals* yang lebih besar bagi perusahaan yang diaudit oleh KAP *big four*. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang diaudit oleh KAP *non big four* lebih melakukan manajemen laba dari pada perusahaan yang diaudit oleh KAP *big four*. Hal ini dikarenakan KAP *big four* berusaha untuk menampilkan kualitas laporan keuangan yang baik untuk mempertahankan reputasi yang telah dimiliki. Untuk itu, hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah:

Ha: Ada perbedaan manajemen laba perusahaan perbankan ditinjau dari jenis KAP (*big N* dan *non big N*).

